



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 18 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 92 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 77);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Kehutanan dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Kehutanan dan Perkebunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Unit Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

### Pasal 4

Tugas pokok Unit Kehutanan dan Perkebunan adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas di bidang Unit Kehutanan dan Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Kehutanan dan Perkebunan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V WILAYAH KERJA

### Pasal 14

Unit Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Ambawang dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

## BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

### Bagian Pertama Tata Kerja

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

### Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 17

- (1) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Kehutanan dan Perkebunan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati *sepanjang mengenai pelaksanaannya*.

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4-1-2010

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/1/2010  
P l t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

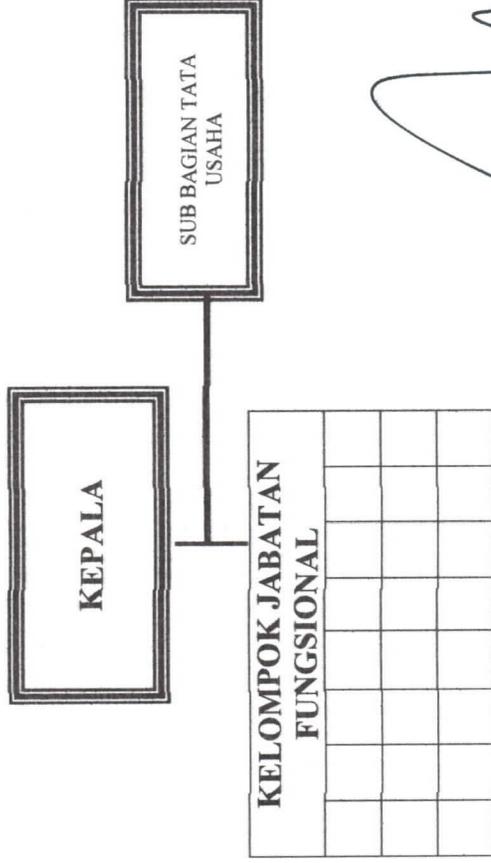
*Wanda*  
AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR : 18 TAHUN 2010  
TANGGAL : 4 - 1 - 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU  
RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN  
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7/1/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

P1 t.

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ..... 2010 ..... NOMOR 18 .....

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN